

**PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA GILINGAN PADI
KELILING DITINJAU MENURUT KONSEP MUDHARABAH**

(Studi Kasus di Desa Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)

LAPORAN AKHIR

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Munaqasah
guna Memperoleh Gelar Ahli Madya(A.Md) Pada Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Disusun Oleh:

ANA MUSTIKA

NIM : 01026203264

PROGRAM STUDI D3

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2013

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah :“ Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada Usaha Gilingan Padi Keliling di Desa Laksamana ditinjau Menurut Konsep Mudharabah”.

Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha gilingan padi keliling di Desa Laksamana tersebut, serta bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha gilingan padi keliling ditinjau menurut konsep Mudharabah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada usaha gilingan padi keliling di Desa Laksamana. Adapun populasi 3 orang, 1 orang pemilik mesin dan 2 orang sebagai pengelola dan sampel diambil dengan teknik *total sampling* yaitu mengambil semua jumlah populasi untuk dijadikan penelitian karena jumlah yang relatif sedikit. Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dari kedua belah pihak yaitu pemilik mesin padi dan pengelola mesin padi dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Laksamana akad yang terjalin antara *shaibul maal* dengan *mudharib* adalah akad lisan dengan keuntungan nisbah bagi hasil dibagi dua atau 50:50. Dalam pembagian hasil ini menggunakan sistem bagi hasil *profit Sharing*, dimana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh dengan mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan dalam pengoprasionalan usaha tersebut, jika pendapatan besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga kecil. Dalam pelaksanaan usaha gilingan padi ini menggunakan konsep *mudharabah muthalaqah* yaitu dimana pengelola diberi kebebasan dalam

menjalankan usaha tersebut. Menurut tinjauan konsep *mudharabah* tentang usaha gilingan padi keliling di Desa Laksamana belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *Mudharabah* ataupun prinsip Syariah karena dalam akad antar *shaibul maal* dan *pengelola* hanyalah akad lisan atau tidak tertulis, dan tidak adanya pengawasan. Seharusnya akad yang digunakan adalah akad tertulis dan alangkah baiknya diadakan pengawasan, karena tidak menutup kemungkinan tanpa adanya pengawasan pengelola bisa saja melakukan kecurangan selama beroperasi dilapangan dan juga dapat menghindari kesalahpahaman antara pemilik dengan pengelola dalam usaha tersebut. Sehingga jika ada keluhan dari pihak pemilik maupun pengelola atas ketidaksesuaian dalam pembagian keuntungan ataupun lainnya dapat ditanggapi dengan tegas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini. Sholawat beriring salam penulis haturkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya bagi umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan.

Laporan Akhir ini berjudul : **“PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL USAHA PENGGILINGAN PADI KELILING MENURUT KONSEP MUDHARABAH”**. Ini merupakan hasil karya ilmiah, guna memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Ahli Madya pada jurusan perbankan syariah fakultas syariah dan ilmu hukum.

Dalam penulisan Laporan Akhir ini penulis menyadari akan kekurangan ataupun kesalahan sehingga jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengalaman penulis, keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada penulis. Namun demikian besar harapan penulis mudah-mudahan Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca semuanya dan terkhusus untuk penulis.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, motivasi, arahan, bimbingan dan perhatiannya baik dari segi material dan segi moral dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepada Orang Tua tercinta, ayahanda dan Ibunda yang telah banyak sekali memberikan semangat dan dorongan kepada ananda baik itu secara material maupun spiritual yang selalu mendoakan keberhasilan ananda, semua jasa dan kasih sayang ayah dan bunda akan ananda kenang hingga akhir kelak, terimakasih ku ucapkan untuk ayahanda dan ibundaku tercinta. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Dan juga terimakasih untuk abang saya dan adik saya, terimakasih atas doanya.
2. Bapak Prof. Dr. H. M Nazir selaku Rektor UIN Suska Riau bersama Purek I, II dan III yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau.
3. Bapak Dr.H.Akbarizan,MA.M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum beserta Pembantu Dekan I, II dan III yang telah

memberikan kemudahan kepada penulis selama penulis melakukan aktivitas perkuliahan.

4. Kepada Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku pembimbing yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini.
5. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku ketua Prodi D. III Perbankan Syariah dan Bapak Khairul Amri, M. Ag selaku sekretaris jurusan perbankan syariah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Dra. Ibu Sopia Hardani, M. Ag. Selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan kemudahan selama perkuliahan.
7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan kemudahan bagi penulis
8. Bapak kepala desa Tarmuji dan perangkat desa dan Bapak Sukar, serta masyarakat Laksamana yang telah banyak memberikan masukan, informasi, dan membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
9. Untuk para sahabat-sahabatku Gusvina Rahayu, Nelly, Sinta Efrida, Dewi Herlina, Melly dan teman-teman lainnya yaitu lokal perbankan syariah 2 yang selalu senantiasa membantu dan memberikanku semangat.
10. Untuk semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah begitu banyak memberikan aspirasi baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu saya mengucapkan ribuan terima kasih yang tiada terhingga.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua terutama kepada kedua orang tua penulis, bapak-bapak dan ibu-ibu serta rekan-rekan sekalian.

Demikian laporan akhir ini penulis selesaikan dengan sebaik mungkin, namun penulis menyadari bahwa penulis adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, maka dari itu dengan segala kerendahan hati kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini dan masa yang akan datang.

Akhir kata semoga tugas akhir ini bisa bermanfaat bagi semua pihak dan hanya kepada Allah penulis memohon ampunan atas semua kesalahan, semoga laporan akhir ini dapat berguna. Amiin.

Pekanbaru, 2 Mei 2013
Penulis

ANA MUSTIKA
NIM: 01026203264

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN PENGUJI

PERSEMBAHAN

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....iv

DAFTAR TABEL.....vi

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Batasan Masalah.....5

C. Rumusan Masalah.....5

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....6

E. Metode Penelitian.....6

F. Sistematika penulisan.....9

BAB II PROFIL DESA LAKSAMANA.....11

A. Geografis dan Demografis.....11

B. Adat istiadat.....13

C. Ekonomi.....15

D. Pendidikan dan Kehidupan Beragama.....16

BAB III TINJAUAN TEORITIS MUDHARABAH.....21

A. Pengertian Bagi Hasil Mudharabah.....21

B. Landasan HukumMudharabah.....30

C. Rukun dan Syarat Bagi Hasil Mudharabah.....	33
D. Jenis – jenis Al-Mudharabah.....	38
E. Hal – hal yang dapat membatalkan kontrak Mudharabah.....	39

BAB IV TINJAUAN KONSEP MUDHARABAH TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL USAHA GILINGAN PADI KELILING DI DESA LAKSAMANA.....42

A. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada Usaha Gilingan Padi di Desa Laksamana.....	42
B. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada Usaha Gilingan Padi ditinjau menurut konsep Mudharabah.....	48

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....55

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel I	Klasifikasi penduduk Desa Laksaman Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak menurut jenis kelamin.....	13
Tabel II	Mata Pencarian penduduk Desa Laksaman Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.....	15
Tabel III	Klasifikasi pendidikan penduduk Desa Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.....	17
Tabel IV	Klasifikasi status Agama yang dianut.....	18
Tabel V	Jumlah sarana peribadatan penduduk Desa Laksaman Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama islam adalah merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya yang mengatur semua aspek kehidupan manusia baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang paling penting adalah bidang muamalah atau *iqtishadiyah* (ekonomi Islam)¹. Sedangkan Islam bersifat universal artinya syariah Islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai nanti sampai datangnya hari kiamat nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim².

Didalam perkembangan kehidupan manusia yang diikuti oleh perkembangan kebutuhan hidup, ekonomi, dan kependudukan. Pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan berbagai kelompok pekerja dan kelompok jabatan, baik yang bersifat formal maupun informal. Pertumbuhan penduduk juga membentuk pola-pola kehidupan manusia

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), h.120

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 4

baru, letak geografis penduduk serta kepadatan penduduk merubah fungsi dan peran manusi³.

Maka materi persoalan dunia bukan merupakan sasaran yang pokok, dalam ajaran Islam kita juga tidak boleh tidak menyenangi dunia, dengan melarikan diri kealam akhirat dan hanya berdoa saja dimasjid. Kita diperintahkan untuk berusaha menggunakan semua kapasitas atau potensi yang ada pada diri masing – masing, sesuai dengan kemampuan⁴. Seorang mukmin yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang disamping memberikan perolehan material juga akan mendatangkan pahala. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al – Jumuah ayat 10.



Artinya: Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil baik dalam perbankan ataupun usaha produktif. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana penyertaan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (*skill*) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila mendapat keuntungan maka hal ini akan

³ Sirod Hantoro, *Kiat Sukses Berusaha*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2005), h.16

⁴ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Islam*, (Bandung : CV . Alvabeta, 2003), h.95.

dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sesungguhnya agama Islam telah mengajarkan bagaimana bekerja sama (bersyarikat) secara benar tidak membenarkan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari riba. Bersyarikat bisa dengan lembaga atau perorangan. Salah satu syarikat yang diperoleh adalah *mudharabah*.

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shaibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan oleh sipengelola, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut⁵. Istilah *mudharabah* sesungguhnya tidak muncul pada masa Nabi SAW, tetapi jauh sebelum Nabi lahirpun sudah ada⁶.

Pelaksanaan *Mudharabah* apabila dikerjakan atau dilaksanakan sesuai dengan hukum yang ditentukan dalam Islam maka akan sangat membantu pihak-pihak yang kurang mampu, karena *mudharabah* ini kerjasama yang saling memanfaatkan atau kerjasama dengan upaya menyatukan potensi yang ada dengan tujuan saling menguntungkan. Dalam perkembangan perekonomian saat ini sistem bagi hasil tidak hanya

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.* h. 95

⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2008), h. 26

dipergunakan dalam perbankan saja, tetapi juga dipakai pada usaha perekonomian lainya guna untuk meningkatkan perekonomian. Penyertaan modal dalam sebuah usaha melalui pendekatan sistem *mudharabah* merupakan hal yang penting untuk dianalisis sebagai langkah awal dari sebuah tinjauan kerja secara menyeluruh. Sistem *mudharabah* memiliki keberhasilan erat dalam sebuah keberhasilan suatu usaha.

Usaha gilingan padi keliling merupakan suatu usaha penggilingan padi yang dilakukan secara keliling dari satu tempat ke tempat lainya. Usaha ini sangat bagus dan bermanfaat baik itu dari pemilik modal, pengelola maupun bagi masyarakat disekelilingnya, dimana bertujuan untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan di Desa Laksamana. Usaha gilingan padi keliling di Desa Laksamana adalah usaha produktif dengan menggunakan sistem bagi hasil, dimana *shaibul maal* menyediakan seluruh modal yaitu berupa mesin padi sedangkan pihak kedua hanya sebagai pengelola saja. Mesin padi keliling tersebut diserahkan kepada pihak kedua atau *mudharib* untuk dioperasikan.

Usaha ini dikelola dan diharapkan dapat memberi kemudahan bagi para petani padi dalam penggilingan hasil panennya. Dimana kerja sama ini diharapkan berbagai pihak dapat sama – sama memperoleh keuntungan antara pemilik modal, pengelola sekaligus juga masyarakat disekitarnya⁷. Usaha gilingan padi didesa ini dikelola oleh orang yang masih memiliki

⁷ Muhammad, *loc.cit.*

hubungan keluarga. Dimana pelaksanaan bagi hasil yang dilakukannya adalah dengan menyerahkan mesin padi tersebut kepada sipengelola. Dan kerjasama usaha pengilingan padi keliling ini pemilik menyerahkan kepada sipengelola untuk dioprasionalkam atas dasar kepercayaan⁸.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini lebih mendalam dan menuangkan dalam bentuk laporan Akhir dengan judul : **“Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Gilingan Padi Keliling Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah “**.

B. Batasan Masalah

Agar lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, penulis perlu membatasi pokok pembahasan masalah ini sesuai dengan judul yaitu pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha gilingan padi keliling ditinjau menurut konsep mudharabah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalahnya dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha gilingan padi keliling di Desa Laksamana?

⁸ Bapak Sukar (Pengelola Mesin Padi Keliling), *Wawancara*, Laksamana, Tanggal 14 Desember 2012.

2. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha penggilingan padi keliling menurut konsep mudharabah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha gilingan padi keliling di Desa Laksamana.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha gilingan padi keliling menurut konsep mudharabah.

Sedangkan kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha gilingan padi keliling di Desa Laksamana ditinjau menurut konsep Mudharabah.
2. Untuk mengembangkan Ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU.

E. Metode penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dari penelitian adalah Jl. Srikandi Desa Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah pemilik dan pengelola mesin padi keliling. Sedangkan objeknya adalah pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha gilingan padi keliling di Desa Laksamana ditinjau menurut konsep mudharabah .

3. Populasi dan sampel

Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik dan pengelola dimana berjumlah 3 orang yaitu 1 orang pemilik mesin padi, 1 orang sebagai pengelola dan 1 orangnya lagi membantu pengelola dalam oprasional usaha penggilingan padi keliling tersebut, mengingat populasinya yang sedikit maka penulis menggunakan *metode total sampling* yaitu dengan mengambil semua populasinya sebagai sampel karena jumlah populasi yang relative sedikit.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua macam yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan, yaitu wawancara yang dilakukan terhadap pemilik mesin padi keliling dan juga pengelola usaha mesin padi keliling tersebut.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang tersedia serta informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini dan buku–buku referensi atau dokumen berkenaan dengan apa yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu penulis melakukan wawancara untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan melalui tanya-jawab dengan pemilik dan pengelola usaha penggilingan padi keliling tersebut.
- b. Observasi yaitu peneliti melakukan peninjauan secara langsung kelapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dimana akan dijadikan sebagai objek tentang pelaksanaan sistem bagi hasilnya.
- c. Studi Kepustakaan yaitu peneliti memperoleh data dari buku diperpustakaan yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan yang bersifat deskriptif. Maka analisa yang penulis gunakan adalah data deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian sehingga diperoleh gambaran umum tentang masalah yang diteliti.

7. Teknik Penulisan

- a. Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu penulis melakukan analisa data atau fenomena yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

- c. Metode Deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh, selanjutnya data-data tersebut dianalisa.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dibagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menerangkan tentang letak geografis dan demografis, adat istiadat, ekonomi, pendudukan dan kehidupan beragama.

BAB III : KONSEP MUDHARABAH DALAM ISLAM.

Dalam Bab ini penulis akan membahas mengenai teori-teori tentang sistem mudharabah, pengertian bagi hasil mudharabah, landasan hukum, rukun dan syarat mudharabah, jenis-jenis mudharabah dan hal-hal yang membatalkan kontrak mudharabah.

**BAB IV : TINJAUAN KONSEP MUDHARABAH TERHADAP
PELAKSANAAN BAGI HASIL PADA USAHA
GILINGAN PADI KELILING DIDESA LAKSAMANA**

Pada Bab ini penulis akan menguraikan tentang pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha penggilingan padi keliling di Desa Laksamana dan menganalisisnya menurut konsep mudharabah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan Bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran dimana penulis menyimpulkan pembahasan serta memberikan saran-saran dengan berpijak pada hasil dari penulisan.

BAB II

PROFIL DESA LAKSAMANA

A. Geografis dan Demografis Desa Laksamana

1. Letak Geografis Desa Laksamana

Desa Laksamana merupakan sebuah Desa yang makmur meskipun penduduknya belum begitu ramai, masyarakat Desa Laksamana memiliki rasa sosial yang tinggi, mereka selalu mengadakan gotong-royong untuk membersihkan Desa disekitar mereka. Pemberian nama Desa Laksamana ini adalah hasil musyawarah dan mufakat dari warga saat itu.

Karena kekaguman atas besarnya persatuan dan harapan masyarakat ini mereka untuk bersepakat untuk menamakan Desa Laksamana. Dimana Laksamana diambil dari nama salah satu Raja di kota Siak. Mereka berharap Desa ini nantinya bisa menjadi Desa yang makmur, dan masyarakat yang berbudi pekerti yang tinggi.

Dalam pelaksanaan pemerintah Desa, Kepala Desa Laksamana dibantu oleh perangkat yang lain yaitu Kepala Dusun (kadus), maupun RW dan RT. Selain itu Desa Laksamana memiliki suatu lembaga yaitu berfungsi sebagai mitra pemerintah kerja Desa yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang diangkat oleh masyarakat yang berfungsi untuk menampung aspirasi rakyat.

Desa Laksamana merupakan salah satu Desa yang terletak diwilayah Kelurahan Laksamana Kecamatan Sabak'auh Kabupaten Siak. Dimana Desa Laksamana mempunyai luas lebih kurang 1488

Ha, dan adapun letak Desa Laksamana ini, mempunyai batas – batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Bengkalis
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Belading
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Bengkalis
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rempak.⁹

2. Letak Demografis Desa Laksamana

Penduduk yang berdomisili di Desa Laksamana Kecamatan Sabak Auh terdiri dari berbagai suku, agama, budaya dan sosial kemasyarakatan. Penduduk Desa Laksamana tercatat berjumlah 1.145 jiwa dengan 312 kepala keluarga. Di Desa Laksamana Kecamatan Sabak Auh merupakan daerah dataran dengan musim yang terjadi didaerah ini hanya dua musim sebagaimana yang terjadi didaerah lainya yaitu musim panas dan musim hujan. Dan untuk lebih jelasnya adapun jumlah penduduk Desa Laksamana berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

⁹Sumber data: Kantor Kepala Desa Laksamana (Tentang Batas-batas Desa Laksamana), 5 April 2013

TABEL 1
Jumlah Penduduk Desa Laksamana Kecamatan Sabak Auh
Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	605 Jiwa	52,84%
2	Perempuan	540 Jiwa	47,16%
Jumlah		1145 Jiwa	100%

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Laksamana

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan yaitu dengan laki-laki 605 jiwa atau 52,84% dan perempuan 540 jiwa atau 47,16% yang berarti jumlah penduduk seluruhnya 1145 jiwa.

B. Adat Istiadat

Masyarakat Desa Laksamana Kecamatan Sabak Auh terdiri berbagai Suku, namun dalam kehidupan sehari-hari penduduknya tetap menjaga adat istiadat masing-masing. Budaya yang berkembang di Desa Laksamana Kecamatan Sabak Auh adalah Suku Jawa dan Melayu. Di Desa Laksamana masyarakatnya lebih banyak Suku Jawa dari pada Suku Melayu, karena kebanyakan masyarakat yang ada di Desa Laksamana pada zaman dulunya adalah penduduk pindahan dari pulau Jawa yang hijrah ke Sumatera dan menjadi penduduk asli Desa Laksamana. Mereka menebang hutan untuk tempat rumah mereka, dan akhirnya penduduk Jawa berkembang di Desa Laksamana. Selain itu Suku Jawa merupakan salah

satu budaya yang berusia tua dan masih bertahan sampai saat ini, dan juga Bahasa Jawa sudah menjadi bahasa keseharian. Dalam pertumbuhannya, kebudayaan Jawa mempunyai hubungan yang erat dengan Islam, sehingga nilai Islam juga mengisi dan memberi corak terhadap kebudayaan Jawa maupun Melayu.

Karena kebudayaan Jawa dan Melayu di Desa Laksamana dilandasi dan banyak diangkat nilai-nilai Islam, hal itu sangat menguasai dimensi budaya orang Jawa dan Melayu. Hal ini dapat dilihat pada acara resepsi pernikahan yang menggunakan adat Jawa dan khitanan anak, dimana pada acara tersebut dilaksanakan secara adat dan agama. Yang dikhitkan terlebih dahulu melaksanakan khatam Al-Quran dan pada acara tersebut dilaksanakan acara kenduri dan doa selamat.

Masyarakat Desa Laksamana di samping sebagai masyarakat adat, mereka juga taat menjalankan perintah-perintah agama. Hal ini dapat dilihat pada aktivitas dan kreativitas sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, seperti melaksanakan sholat secara berjamaah serta adanya kegiatan pengajian dan wirid yasinan yang dilakukan oleh ibu-ibu, ada juga dilakukan oleh bapak-bapak dan dilakukan oleh para remaja masjid. Acara-acara seperti ini dilaksanakan sesuai dengan adat setiap suku yang ada di Desa Laksamana. Dengan demikian adat istiadat yang ada di Desa Laksamana tetap terjaga dan terlestarikan sesuai dengan suku-suku yang ada¹⁰.

¹⁰ Tarmuji, (Kepala Desa), wawancara, Sejangat tanggal 5 April 2013

C. Ekonomi

Berdasarkan survei lapangan, dapat diketahui bahwa tingkat perekonomian masyarakat Desa Laksamana Kecamatan Sabak Auh adalah tergolong pada masyarakat yang mempunyai ekonomi yang baik. Dan pada sisi lain komposisi tanahnya yang subur, maka mata pencarian masyarakat pun beraneka ragam, ada yang menjadi petani, pedagang, buruh, karyawan, wiraswasta, pegawai negeri, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini:

TABEL II

Mata Pencarian Penduduk Desa Laksamana Kecamatan Sabak Auh

NO	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani	461 Jiwa	40,26%
2	Pedagang	77 Jiwa	6,72%
3	Buruh	59 Jiwa	5,15%
4	Karyawan	43 Jiwa	3,76%
5	Wiraswasta	79 Jiwa	6,90%
6	PNS	78 Jiwa	6,81%
7	Dll	73 Jiwa	6,38%
8	Belum bekerja	275 Jiwa	24,01%
JUMLAH		1145 Jiwa	100%

Sumber data: Kantor Kepala Desa Laksamana Kecamatan Sabak Auh

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat Desa Laksamana mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda, dengan mayoritas mata pencarian masyarakat Desa Laksamana adalah bertani yaitu sebanyak 461 Jiwa atau 40,26%, kemudian diikuti dengan pedagang yaitu sebanyak 77 Jiwa atau 6,72%, selanjutnya buruh 59 jiwa atau 5,15%, selanjutnya wiraswasta 79 Jiwa atau 6,90%, selanjutnya PNS 78 Jiwa atau 6,81% dan yang tidak bekerja berjumlah 275 jiwa atau 24,01% yang didominasi oleh ibu-ibu di Desa Laksamana yang tidak bekerja, dan mereka hanya sebagai ibu rumah tangga.

D. Pendidikan dan Kehidupan Beragama

1. Pendidikan

Bidang pendidikan adalah salah satu bidang yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena dengan pendidikan masyarakat akan maju dan berkembang. Pendidikan juga berpengaruh terhadap perkembangan penduduk baik dibidang sosial budaya, cara berfikir maupun perekonomian ataupun dibidang lainnya. Pada umumnya semakin masyarakat mempunyai pendidikan yang tinggi, maka akan semakin baik dan sejahtera masyarakat tersebut. Karena pendidikan adalah salah satu sarana atau dasar untuk menuju perkembangan penduduk yang lebih maju.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dengan sebagian masyarakat Desa Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak,

bahwasanya Desa Laksamana merupakan Desa yang mulai berkembang dengan baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang tamat sekolah secara formal. Walau masih ada yang tidak bersekolah, namun bila dibandingkan yang sudah tamat SD sampai SLTA dan yang sampai tamat perguruan tinggi yang ada di Desa Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL III

Klasifikasi Pendidikan Penduduk Desa Laksamana Kecamatan Sabak Auh

NO	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Akademi/Perguruan Tinggi	54 Orang	4,71%
2	SLTA/SMA Sederajat	198 Orang	17,30%
3	SLTP/MTs Sederajat	126 Orang	11,01%
4	SD	105 Orang	9,17%
5	TK/PAUD	33 Orang	2,88%
6	Belum Sekolah	153 Orang	13,37%
7	Tidak Tamat SD	245 Orang	21,40%
8	Tidak Sekolah	231 Orang	20,19%
JUMLAH		1145 Orang	100%

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Sejangat Kecamatan Sabak Auh

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk yang tidak tamat SD merupakan jumlah yang terbanyak yaitu 245 Orang atau 21,40%, kemudian diikuti oleh penduduk yang tidak berpendidikan yaitu 231 Orang atau 20,19%, selanjutnya SLTA/SMA Sederajat yaitu 198 Orang atau 17,30%, selanjutnya belum sekolah yaitu 153 Orang atau 13,37%, selanjutnya SLTA/SMP Sederajat yaitu 126 Orang atau 11,01% dan TK/PAUD yaitu 33 Orang atau 2,88%, sedangkan tingkat pendidikan sarjana merupakan kelompok yang paling sedikit yaitu 54 Orang atau 4,71%.

2. Agama

Suasana kehidupan beragama yang penuh dengan kerukunan, baik hubungan intern atau antar umat beragama sangat dibutuhkan masyarakat seperti aman tertib dan tentram. Warga Desa Laksaman sangat menjaga hubungan setiap warga sehingga tidak terjadi pertentangan umat beragama. Kesadaran untuk menumbuhkan suasana kehidupan yang tertib aman dan tentram dalam beragama, maka perlu sekali masyarakat mengembangkan sikap saling menghormati, tenggang rasa dan bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kehidupan beragama di Desa Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak bahwa mayoritas penduduknya adalah beragama Islam dari pada yang lainnya. Untuk mengetahui lebih jelas agama yang dianut masyarakat Desa Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL IV

**Klasifikasi Status Agama Yang Dianut Di Desa Laksamana Kecamatan
Sabak Auh**

NO	AGAMA	Jumlah	Persentase
1	Islam	1130	98,69%
2	Protestan	4	0.35%
3	Katolik	-	0%
4	Budha	11	0,96%
5	Hindu	-	0%
JUMLAH		1145	100%

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Laksamana Kecamatan Sabak Auh

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 1130 jiwa atau 98,69% adalah penduduk Desa Laksamana yang memeluk agama Islam, 4 jiwa atau 0.35% memeluk agama Protestan, dan 11 jiwa atau 0,96% memeluk agama Budha.

Untuk menunjang kegiatan keagamaan bagi masyarakat Desa Laksamana, maka dibangun tempat peribadatan sesuai dengan agama masing-masing. Karena mayoritas penduduk beragama Islam, maka di Desa Laksamana banyak di bangun masjid dan mushalla. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL V

Jumlah Sarana Peribadatan Penduduk Desa Laksamana Kecamatan

Sabak Auh

NO	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushalla	8
3	Kelenteng	-
4	Gereja	-
JUMLAH		11

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Laksamana Kecamatan Sabak Auh

Tabel diatas menunjukkan bahwa Desa Laksamana terdapat 3 Masjid dan 8 Mushalla. Dan untuk penganut agama kristen, budha, dan lainnya tempat peribadatan tidak ada di Desa Laksamana tetapi terletak di di Desa lain. Sedangkan jika dilihat dari segi kehidupan keagamaan Desa Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak mulai meningkatkan, hal ini terlihat dengan adanya serangkaian kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di masjid-masjid dan mushalla-mushalla, mereka menggunakan masjid dan mushalla sebagai tempat belajar mengaji ilmu agama, seperti wirid pengajian, wirid yasinan ibu-ibu dan remaja masjid dan kegiatan-kegiatan lainnya.

BAB III

KONSEP BAGI HASIL DALAM ISLAM

(MUDHARABAH)

A. Pengertian Bagi Hasil Mudharabah

1. Pengertian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem Perbankan Syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada terjadinya kontrak (akad)¹¹. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan dimasing – masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan adalah sebagai berikut¹²:

¹¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002). h.101

¹² *Ibid*, h.102

a. *Profit Sharing*

Profit sharing menurut etimologi indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

Dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya–biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b. *Revenue sharing*

Revenue sharing berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Jadi perhitungan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan kepada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha mendapatkan usaha tersebut.

Aplikasi kedua dasar bagi hasil ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada *profit sharing* semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapat bagi hasil sesuai dengan

laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang manual. Disini unsur keadilan dalam berusaha betul–betul diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar maka pemilik juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau labanya kecil maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud. Untuk mengurangi resiko ditolaknya calon investor yang akan menginvestasikan dananya maka pengelola dana dapat memberikan porsi bagi hasil lebih besar dibandingkan dengan porsi bagi hasil menurut *revenue sharing*¹³.

Untuk mengatasi ketidaksetujuan prinsip *profit sharing* karena adanya kerugian bagi pemilik dana maka prinsip *revenue sharing* dapat diterapkan, yaitu bagi hasil yang dapat didistribusikan kepada pemilik dana didasarkan pada *revenue* pengelola dana tanpa dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan. Dalam *revenue sharing*, kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil, dihitung dari pendapatan pengelola dana akan mendapatkan bagi hasilnya. Tetapi bagi pengelola dana hal ini dapat memberikan resiko bahwa suatu priode tertentu pengelola dana mengalami kerugian, karena bagi hasil yang diperoleh lebih kecil dari beban

¹³ Slamet Wiyono, *Akutansi Perbankan Syariah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005) cet. Ke 1 h. 57-58

usaha untuk mendapatkan *revenue sharing* tersebut. Disinilah ketidakadilan dapat dirasakan oleh pengelola dana karena terdapat resiko kerugian, sedangkan pemilik dana terbebas dari resiko.

Jalan keluar yang dapat dijalankan adalah pengelola dana harus menjalankan usaha dengan prinsip *prudent* atau usaha penuh kehati-hatian, sehingga dengan *revenue sharing* resiko kerugian dapat ditekan sekecil mungkin agar pemilik dana (investor) tertarik menginvestasikan dananya pada usaha yang dikelola Bank Syariah¹⁴.

Dari uraian diatas dapat terlihat perbedaan mendasar yang membedakan antara kedua prinsip tersebut terletak pada hal – hal berikut. Pertama, dalam prinsip *profit sharing* pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*. Sedangkan dalam prinsip *revenue sharing* pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus dikakulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran oprasional usaha, kedua, pada prinsip *profit sharing*, biaya – biaya oprasional akan dibebankan kedalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung oleh *shahibul maal*. Sedangkan dalam prinsip *revenue sharing*, biaya – biaya akan ditanggung *mudharib*, yaitu pengelola modal.

¹⁴ Slamet Wiyono, *op.cit.* h. 56.

Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip dasar bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani adalah sebagai berikut¹⁵:

- a. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
- b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- c. Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak.
- d. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

2. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan ekonomi, yang biasa disebut *qiradh*¹⁶. *Mudharabah* atau *Qiradh* merupakan salah satu bentuk transaksi akad yang merupakan salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *Qiradh* (potongan) dengan demikian *mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Menurut bahasa, *qiradh* () diambil dari kata () yang berarti () yakni potongan, sebab pemilik memberikan

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007), h.49.

¹⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), h.11

potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh¹⁷.

Orang irak menyebutnya dengan istilah *mudharabah* () yang berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan dan lebih tepatnya adalah proses orang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya¹⁸ dan seorang pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan suatu harta modal yang ada dimana perjalanan tersebut dinamakan ()¹⁹.

Sedangkan menurut istilah, ulama berbeda – berbeda mendefinisikan sesuai dengan tujuan mereka masing – masing seperti:

- a. Wahbah Al-zuhaily bahwa *mudharabah* adalah memberikan harta sesuai dengan perjanjian yang ditentukan atau dengan kata lain akad yang bertujuan untuk memberikan harta kepada orang lain dan dikembalikan semisalnya²⁰.
- b. Umar Bin Khattab, bahwa *mudharabah* adalah persekutuan antara dua orang dimana modal investasinya dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain. Sedangkan untungnya akan dibagi diantara mereka kedua sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pihak investor²¹.

¹⁷ Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan UMUM*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), h. 223.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.* h. 95

¹⁹ Rachmad Syafi'i, *op.cit.* h. 224

²⁰ Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh-al Islam wa adillatuh*, (Dar al-Fikri, tt), jus IV, h. 720.

²¹ M. Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab ra*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 573.

- c. Menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat – syarat yang telah ditentukan²².
- d. Menurut Imam Taqiyuddin, *mudharabah* ialah akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan²³.

Secara teknis dan inti mekanisme daripada investasi bagi hasil (*mudharabah*) ini adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shaibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Sementara keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak pertama secara keseluruhan selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian sipengelola atau kecurangan, maka sipengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut²⁴.

Para fuqaha dan sebagian para sejarawan muslim secara umum mendefinisikan *mudharabah* sebagian kerjasama antar dua pihak, yaitu pihak pertama memberikan fasilitas modal dan pihak kedua memberikan tenaga atau kerja. Perhitungan labanya akan dibagi dua dan kerugiannya

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) h.136.

²³ *Ibid*, h.138

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *loc.cit*

ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa kerja sama model *mudharabah* ini muncul ketika terdapat dalam sebuah masyarakat keinginan untuk bekerja sama antar anggotanya dalam rangka meningkatkan taraf hidup ekonomi²⁵.

Definisi umum *mudharabah* secara fiqih, menurut sadr disebut sebagai: Kontrak khusus antara pemilik modal dan pengusaha dalam rangka mengembangkan usaha yang modalnya berasal dari pihak pertama dan kerja dari pihak kedua, mereka bersatu dengan keuntungan dengan pembagian berdasarkan persentase. Jika proyek (usaha) mendatangkan keuntungan, maka laba dibagi berdua berdasarkan kesepakatan yang terjalin antara keduanya, jika modal tidak mempunyai kelebihan atau kekurangan, maka tidak ada bagi pemilik modal selain modal pokok tersebut, begitu pula dengan dengan pengusaha tidak mendapatkan apa-apa. Jika proyek rugi yang mengakibatkan hilangnya modal pokok maka kerugian itu ditanggung oleh pengusaha dan menjadikannya sebagai jaminan bagi modalnya kecuali proyek itu didasarkan pada bentuk pinjaman dari pemilik modal kepada pengusaha. Jika demikian maka pemilik modal tidak berhak mendapatkan apapun dari keuntungan tersebut²⁶.

Berdasarkan definisi tersebut terdapat dua pihak dalam kontrak *mudharabah*, yaitu pihak *shaibul maal* dan *mudharib*. *Shaibul maal* adalah orang yang mempunyai surplus dana yang menyediakan dana tersebut untuk kepentingan usaha. Sementara *mudharib* adalah pengelola usaha yang membutuhkan dana dari *shaibul maal*. Menurut kuran, kedua belah pihak harus memahami betul bagaimana kontrak *mudharabah* dijalankan sehingga ia nenenegaskan bahwa:

Keduanya saling memahami, artinya *shaibul maal* mengenali *mudharib* dan memahami jenis – jenis usaha yang akan dilakukannya, begi

²⁵ Muhammad, *op.cit*, h.27.

²⁶ *Ibid*, h.27-28

pula *mudharib* mengerti akan kemurahan hati *shaibul maal*, keduanya terlibat langsung dalam kontrak kerja sama yang saling membutuhkan tersebut dan dilakukannya sendiri secara sadar dan dapat diperkirakan hasil usahanya²⁷.

Mudharabah ini memang diasyari'at oleh Islam, dan dibolehkan untuk memudahkan hidup manusia. Kadang-kadang ada sebagian orang yang mempunyai uang, tetapi tidak bisa mengembangkannya. Sementara itu ada orang yang tidak mempunyai uang, tapi punya kemampuan untuk mengembangkannya. Mu'amalah seperti ini memberi manfaat kepada kedua belah pihak. Dengan prinsip *mudharabah* harta lebih bermanfaat, dan terwujudlah kerjasama antara harta dan tenaga dalam melakukan suatu usaha. Allah tidak akan mensyari'atkan akad-akad kalau bukan untuk merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan²⁸.

Dari beberapa pengertian *mudharabah* diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu ikatan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola modal atau usaha dan atas dasar kesepakatan bahwa apabila terdapat keuntungan maka keuntungan itu dibagi antara pemilik modal dengan pengelola, sedangkan terjadi kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana selama itu bukan atas kelalaian pihak pengelola dana.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, (bandung : PT. Al-Ma'rif, 1985) Cet. I. h. 197

B. Landasan Hukum *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dibenarkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling mambantu antara pemilik modal dan orang yang memutar uang. *Mudharib* sebagai interpreuner adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dan ridha Allah SWT²⁹.

Secara umum kegiatan *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini ulama fiqih sepakat bahwa *mudharabah* di syaratkan dalam Islam berdasarkan pada Al-Quran, Sunah, Ijma' dan Qiyas.

1. Berdasarkan Al – Qur'an

Adapun ayat – ayat yang berkenaan dengan *mudharabah*, antara lain: Qs. Al – Maidah(5:1)

.....

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....”

Yang menjadi argumen dari ayat diatas adalah kata *yadhribun* yang sama dengan akarnya *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

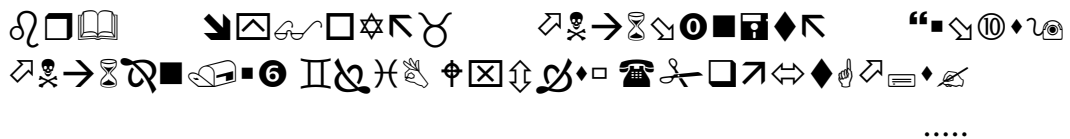
Qs. Al - Jumu'ah ayat 10:

.....

²⁹ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 87

Artinya: ..apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi ini dan carilah karunia allah SWT.

Qs. Al - Baqarah ayat 198:



Artinya: “ tidak ada halangan (dosa) bagi kamu untuk mencari karunia TuhanMU.

Dalam surah Al-Jumuah dan surah Al-Baqarah sama – sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan dan menjalankan usaha. Disamping ayat-ayat Al–Quran Nabi juga memberikan dorongan kepada kita untuk melakukan transaksi dengan *mudharabah*³⁰.

2. As – sunah

Diantara hadist yang berkaitan dengan *mudharabah* sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Shuhaib bahwa Nabi SAW, bersabda:

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيهن البركة: البيع إلى أجل و المقارضة و خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. (

Artinya : “Dari Shahih bin Suhaib dari bapaknya berkata : bahwa Rasullullah SAW bersabda, tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli sampai batas waktu, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang

³⁰ Ibid, h. 88

lain) dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”(HR.Ibnu Majah)³¹.

Rahmad Allah SAW tercurah atas dua pihak yang sedang bekerja sama selama mereka tidak melakukan penghianatan, manakala berkhianat bisnisnya akan tercela dan keberkahan pun akan sirna dari padanya. (HR. Abu Daud, Baihaqi, dan Al-Hakam)³².

Legitimasi hukum *mudharabah* dapat pula dianalogikan dengan *Al-Musaqat* (perkongsian antara pemilik dan pengelola) karena kebutuhan manusia terhadapnya dimana sebagian orang memiliki dana dan tidak mempunyai keahlian untuk mengelolanya, sedangkan pihak yang lain memiliki keahlian tetapi tidak mempunyai modal untuk menopang usahanya.

3. Ijma' Ulama

Ibnu Al-Mundzir berkata, "para ulama sepakat bahwa secara umum, akad(transaksi) *mudharabah* diperbolehkan"³³.

Akad *mudharabah* adalah akad jaa'iz (toleran), bukan akad lazim (mengikat). Untuk itu, kapan saja salah satu pihak menginginkan akad

³¹ Ibnu Hasan Al-Asqalani, *Buluqhuul Maram*, Penerjemah Thahirin Suparta, (Bandung: CV Diponegoro, 1988) h. 452

³² Muhammad, *op.cit.*, h.50

³³ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Buluqhuul Maram ra*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), h.23.

dihentikan maka akad tersebut dapat dihentikan (faskh). Pada saat itu, *mudharib* harus menyerahkan modal dalam bentuk mata uang (tunai)³⁴.

Akad *mudharabah* adalah salah satu akad yang diberkahi oleh Allah. Dalam sebuah hadis Qudsi Allah SWT berfirman:

Artinya: “aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bekerja sama selama salah satunya tidak berkhianat”.

Selain itu di antara ijma' dalam *mudharabah* adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

4. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditunjukkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemakmuran manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka³⁵.

C. Rukun dan Syarat Bagi Hasil *Mudharabah*

³⁴ *Ibid*, h. 24

³⁵ Syafii Jafri, *Op.cit*, hal. 90

1. Rukun *mudharabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah Ijab dan Qabul, yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharbah* atau kata-kata yang searti dengannya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*) dan shighat (*ijab qabul*).

Menurut ulama Syafi'iyah rukun *qiradh* ada enam yaitu: ³⁶

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang – barangnya,
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang,
- d. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
- e. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba,
- f. Keuntungan.

Menurut Adiwarman A.karim, faktor-faktor yang harus ada (*rukun*) dalam akad *mudharaah* adalah ³⁷:

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

³⁶ Hendi Suhendi, *op.cit*, h.139

³⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Ed 3-4, h. 205-206.

Jelaskan bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shaibul al-maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib atau amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

c. Persetujuan kedua belah pihak (*Ijab-Qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad *mudharabah*. Sipemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara sipelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual-beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

2. Syarat *mudharabah*

Syarat-syarat *mudharabah* adalah³⁸:

- a. Modal hendaknya uang legal, sedangkan menggunakan perhiasan buah-buahan dan barang dagangan lainnya diperselisihkan ulama.
- b. Pengolahan tidak boleh dipersulitkan dengan melaksanakan jual beli, karena menyebabkan tidak tercapainya tujuan *mudharabah*, kadang-kadang pengusaha memperoleh kesempatan manis untuk memperoleh kesempatan manis untuk memperoleh laba, akan tetapi ditanya-tanya terus oleh pemilik modal, akhirnya usahanya itu gagal dengan demikian gagal pula tujuan *mudharabah* yang sebenarnya yaitu memperoleh keuntungan.
- c. Laba dibagi bersama antara pemilik modal dengan pengusaha, yang satu mendapatkan bagian laba dan jerih payahnya dan yang lain mengambil bagian laba dari modalnya.

³⁸ *Ibid*, h. 208-209

- d. Pembagian laba hendaknya sudah ditentukan dalam akad.
- e. Akad tidak ditentukan berapa lama, karena laba itu tidak bisa diketahui kapan waktunya, seorang pengusaha kadang-kadang belum berlabanya hari ini akan tetapi mungkin akan memperoleh laba beberapa hari kemudian.

Adapun syarat – syarat sahnya *mudharabah* yang dimana berkaitan dengan aqidain (dua orang yang berakad), modal, dan laba adalah³⁹:

a. *Syarat aqidain*

Yakni disyaratkan pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. *Mudharabah* dibolehkan dengan orang kafir dzimmi atau orang kafir yang dilindungi dinegara islam. Sedangkan Malikiyah menambahkan asalkan tidak melakukan riba.

b. *Syarat Modal*

1. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham atau sejenisnya yang memungkinkan dalam perkongsian.
2. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
3. Modal harus ada, bukan berupa uang, tetapi tidak berarti harus ada ditempat akad.
4. Modal harus diberikan kepada pengusaha agar dipergunakan harta tersebut sebagai amanah.

³⁹ Rachmad Syafi'i, *op.cit.*, h.198

c. *Syarat – syarat laba*

1. laba harus memiliki ukuran.
2. laba harus berupa bagian yang umum.

3. Jenis - Jenis *Al-Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu *Mudharabah muthalaqah* (investasi tidak terikat) dan *Mudharabah muqayyadah* (investasi terikat)⁴⁰:

a. *Mudharabah muthalaqah*

Yaitu kerja sama antara *shaibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha. Waktu dan daerah bisnis, dalam *mudharabah mutalaqah*, *mudharib* mendapat kebebasan dalam menyusun rencana dan mengatur kegiatan usaha *mudharabah* sebagaimana yang ia inginkan tanpa intervensi dari bank.⁴¹

b. *Mudharabah muqayadah*

Yaitu suatu bentuk kerjasama dimana *shaibul maal* menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi *mudharib* baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usaha⁴².

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h.97.

⁴¹ Muhammad, *op.cit.*, h.38.

⁴² Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Para prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahib al mal* tidak menetapkan restriksi atau syarat- syarat tertentu kepada si *mudharib*, hal ini disebabkan karena ciri khas *mudharabah* zaman dulu yakni berdasarkan hubungan langsung dengan personal yang melibatkan kepercayaan (*amanah*) yang tinggi. Bentuk *mudharabah* ini di sebut dengan *mudharabah muthalaqah*, namun demikian, apabila di pandang perlu, *shahib al-mal* boleh menetapkan batasan batasan atau syarat-syarat tertentu demi menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan-batasan ini harus dipatuhi oleh *mudharib*. Apabila *mudharib-mudharib* melanggar batasan batasan ini ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, jenis *mudharabah* seperti ini disebut dengan *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terbatas) . Jadi pada dasarnya, terdapat dua bentuk *mudharabah* , yakni *muthalaqah* dan *muqayyadah*⁴³.

4. Hal – Hal Yang Dapat Membatalkan Kontrak Mudharabah

Bagi hasil *mudharabah* dianggap batal apabila terdapat hal – hal berikut⁴⁴:

- a. Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan

Mudharabah dapat batal karena dibatalkan oleh para pihak, dihentikan kegiatannya atau diberhentikan oleh pemilik modal. Hal ini apabila terdapat syarat pembatalan dan penghentian kegiatan atau pemecatan tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Pihak yang bersangkutan (*mudharib*) mengetahui pembatalan dan menghentikan kegiatan tersebut. Apabila *mudharib* tidak

⁴³ Adiwarman Karim, *op.cit*,h.212

⁴⁴ Rachmad Syafi'i, *op.cit*, h. 227

tahu tentang pembatalan dan pemecatannya, lalu ia melakukan tasaruf maka tasaruf hukumnya sah.

- 2) Pada saat pembatalan dan penghentian kegiatan usaha atau pemecatan tersebut, modal harus dalam keadaan tunai sehingga jelas ada atau tidak adanya keuntungan yang menjadi milik bersama antara pemilik modal dengan pengelola. Apabila modal masih berbentuk barang maka pembatalan tidak sah.

b. Salah seorang akad meninggal dunia

Jumhur lama telah berpendapat bahwa *mudharabah* batal jika salah seorang aqid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalkan wakil atau yang mewakilkan. Pembatasan tersebut dipandang sempurna dan sah⁴⁵. Baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

c. Salah seorang aqid gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah* sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

d. Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim., menurut Imam Abu

⁴⁵ Syafi'i Jafri, *Op.cit.* h. 96

Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan diantara para ahli warisnya.

e. Modal rusak ditangan pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *mudharabah* batal.

Begitu pula, *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan⁴⁶.

⁴⁶ <http://imronfauzi.wordpress.com/2008/06/12/qiradh-mudharabah/>

BAB IV

TINJAUAN KONSEP MUDHARABAH TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL PADA USAHA GILINGAN PADI KELILING DI DESA LAKSAMANA

1. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi di Desa Laksamana

Sistem bagi hasil yang umum atau yang lazim diterapkan terdiri atas dua bentuk yaitu: *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* merupakan perhitungan bagi hasil laba atau keuntungan dari pengelolaan dana yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban atau biaya-biaya usaha untuk mendapatkan beban tersebut. Sedangkan *revenue sharing* merupakan sistem bagi hasil yang perhitungannya sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut⁴⁷.

Kedua bentuk bagi hasil ini masing – masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Pada *profit sharing* semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan bagi hasil apabila pengelola mengalami

⁴⁷ Slamet Wiyono, *loc.cit*

kerugian. Pada prakteknya pada lembaga keuangan *profit sharing* sangat jarang digunakan, apabila sistem ini diterapkan maka pihak *shahibul maal* menanggung biaya operasional, karena pengelola atau *mudharib* dapat meninggikan biaya oprasional sehingga akan mempengaruhi pada bagi hasil yang diterima nantinya, apabila biaya oprasional tinggi maka bagi hasil bersih yang dibagikan akan menjadi sedikit⁴⁸.

Berbeda dengan *revenue sharing* kedua belah pihak akan mendapatkan bagi hasil dari seluruh pendapatan pengelola dana. Jika ditinjau dari pemilik dana maka bagi hasil ini akan menguntungkan, karena selama pengelola memperoleh *revenue* maka pemilik dana akan mendapatkan bagi hasilnya. Akan tetapi bagi pengelola hal ini dapat memeberikan resiko bahwa jika bagi hasil yang ia terima lebih kecil daripada biaya oprasional selama ia mengelola dana maka akan mengalami resiko kerugian. Oleh karena itu pihak pengelola harus benar-benar amanah dalam menjalankan usahanya, tidak meninggikan biaya oprasionalnya bahkan sedapat mungkin meminimalisir biaya tersebut, agar bagi hasil yang diterima lebih besar dari biaya oprasional, jika demikian maka usaha tersebut mengalami keuntungan.

Dalam usaha bagi hasil gilingan padi keliling di Desa Laksamana tidak memberi nama dengan sistem *mudharabah*. Mereka hanya menyebutkannya dengan sistem bagi hasil. Secara teoritis sistem bagi hasil ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*

⁴⁸ *Ibid*, h.57

atau *syirkah*. Penulis menuliskan bahwa sistem bagi hasil ini berdasarkan konsep *mudharabah*, yaitu pemilik modal atau *shahibul maal* memberikan dana 100% kepada pengelola dana atau *mudharib* yaitu berupa mesin gilingan padi tersebut. Sedangkan penulis tidak menyebutkannya dengan *musyarakah* karena secara teori *musyarakah* merupakan sistem bagi hasil dimana kedua belah pihak memberikan kontribusi dana untuk menjalankan suatu usaha atau proyek.

Pada pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Laksamana dalam usaha penggilingan padi keliling ini menggunakan sistem bagi hasil *profit sharing*, dimana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola dengan mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan. Jika pendapatannya besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga kecil⁴⁹. Adapun perhitungan sistem bagi hasil di Desa Laksamana seperti:

Bapak Sukar adalah seorang pengelola mesin padi keliling milik Bapak Tarmuji dengan kesepakatan keuntungan 50:50. Dalam usaha penggilingan padi ini Bapak Tarmuji (*saibul maal*) sebagai pemilik dan Bapak Sukar (*mudharib*) sebagai pengelola usaha penggilingan padi keliling memiliki kesepakatan dalam perhitungan bagi hasilnya dilakukan setiap satu bulan sekali dengan beroperasi mulai dari jam 14.00 – 17.00 WIB. Dimana Bapak Sukar dalam perharinya dapat menggiling padi

⁴⁹ Tarmuji, (pemilik mesin padi), *Wawancara*, Laksamana, tanggal 8 April 2013.

dengan keliling kekampung-kampung sekitar lebih kurang 420 kg s/d 480 kg padi. Dan setiap 12 kg nya Bapak Sukar mendapat upah 7,5 ons beras, dan dalam setiap beroprasional Bapak Sukar menghabiskan minyak sekitar lebih kurang 10 s/d 12 liter minyak dalam perharinya, dan ditambah dengan biaya lain-lain seperti servis atau perbaikan sekitar lebih kurang Rp 50.000 dalam setiap bulannya. Sebagai contoh dalam perharinya Bapak Sukar dapat menggiling padi sekitar 480 kg padi, Jadi perhitungan dalam satu bulannya yang diperoleh adalah $480 \text{ kg padi} \times 30 \text{ hari} = 14.400 \text{ kg padi}$ yang dapat digiling. Dan penghasilan ataupun upah yang didapat oleh Bapak Sukar dalam perharinya sekitar 7.5 ons beras $X 40 \text{ kg padi} = 30 \text{ kg beras}$, jadi perhitungan penghasilan atau upah dalam satu bulannya yang didapat oleh Bapak Sukar adalah $30 \text{ kg beras} \times 30 \text{ hari} = 900 \text{ kg beras}$. Selain itu juga dalam setiap beroprasional Bapak Sukar menghabiskan 12 liter minyak dalam perharinya, jadi kalau dikakulasikan dalam satu bulannya $12 \text{ liter} \times 30 \text{ hari} = 360 \text{ liter minyak}$ yang dihabiskan oleh Bapak Sukar dalam beroprasi. Dan ditambah dengan biaya lain-lain seperti servis atau perbaikan Rp 50.000 dalam setiap bulannya.

Pada pelaksanaan bagi hasil usaha penggilingan padi antara Bapak Tarmuji dengan Bapak Sukar dapat disimpulkan sebagai berikut: Bapak Sukar dalam satu bulannya dapat menggiling padi secara keliling kurang lebih 14.400 kg padi, dan penghasilan atau upah dari hasil gilinganya dalam satu bulannya 900 kg beras, dan dalam setiap bulanya

menghabiskan minyak 360 liter minyak dan biaya service dan lain-lain Rp 50.000. Dalam pelaksanaan bagi hasil usaha ini pemilik dan pengelola memiliki kesepakatan dalam pembagian hasilnya tidak berbentuk padi atau beras melainkan dalam bentuk uang dimana beras yang didapat dijual kemudian uangnya dibagikan sesuai kesepakatan. Didesa Laksamana harga beras adalah rata-rata Rp 8000 per 1 kg nya. Jadi perhitungan bagi hasil antara Bapak Tarmuji Dan Bapak Sukar adalah $900 \text{ kg beras} \times \text{Rp } 8000 = \text{Rp } 7.200.000,-$ dan biaya oprasional dalam setiap bulanya adalah $360 \text{ liter} \times \text{Rp } 5500 = \text{Rp } 1.980.000$ ditambah biaya service Rp 50.000. Jadi jumlah pengeluaran atau biaya untuk oprasional dalam usaha penggilingan padi ini biaya minyak, service, dan lain-lain adalah $\text{Rp } 1.980.000 + \text{Rp } 50.000 = \text{Rp } 2.030.000$ per bulan. Maka perhitungan bagi hasil antar Bapak Tarmuji dengan Bapak Sukar adalah $\text{Rp } 7.200.000 - \text{Rp } 2.030.000 = \text{Rp } 5.170.000$. Jadi uang Rp 5.170.000 itu dibagi dua sesuai dengan kesepakatan awal. Yaitu Bapak Tarmuji memperoleh $50\% \times \text{Rp } 5.170.000 = \text{Rp } 2.585.000$ dan hasil untuk Bapak Sukar adalah $50\% \times \text{Rp } 5.170.000 = \text{Rp } 2.585.000^{50}$. Itulah hasil yang mereka dapatkan dari keuntungan usaha tersebut.

Dalam sistem bagi hasil ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh pemilik mesin padi dan pengelola walau dalam kerjasama dalam usaha penggilingan padi keliling ini adalah prosedurnya yang mereka buat adalah perjanjian tidak tertulis, jadi akad

⁵⁰ Sukar, (pengelola), *Wawancara*, Laksamana, tanggal 9 April 2013

yang terjalin dalam usaha ini hanyalah akad lisan saja yang berarti didasari unsur kepercayaan dan kejujuran antara kedua belah pihak, artinya mesin padi diserahkan atas dasar kepercayaan kepada pengelola dan di mana masing - masing mendapat hasil bagian setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam oprasional sesuai kesepakatan diawal perjanjian, dengan kata lain perjanjian ini berbentuk kekeluargaan.

Dalam pembagian nisbah keuntungan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang berakad, dimana nisbah harus dinyatakan dalam persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Seperti 50%:50%, 60%:40%, 99%:1% tetapi tidak boleh sebesar 100%:0%⁵¹. Dalam bagi hasil usaha penggilingan padi keliling di Desa Laksamana telah terjadi kesepakatan antara pemilik modal dengan pengelola bahwa penghasilan atau upah dari penggilingan padi tersebut dibagi dua setelah dikurangi dengan biaya oprasional yaitu 50%:50%, 50% bagian pemilik modal dan 50% bagian pengelola.

Dalam usaha bagi hasil gilingan padi keliling di Desa Laksamana sistem bagi hasil yang digunakan berdasarkan konsep *mudharabah*. Secara teoritis *mudharabah* ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu *mudharabah muthalaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Penulis menuliskan bahwa sistem usaha ini berdasarkan konsep *mudharabah muthalaqah* (bebas), dimana pemilik modal memberikan kebebasan dan

⁵¹ Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), cet. Ke-3, h. 131

kekuasaan kepada pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis, waktu, tempat, daerah maupun yang lainnya dalam mengelola, dan melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan. Sedangkan penulis tidak menyebutkannya dengan *mudharabah muqayyadah* (terikat) karena secara teori *mudharabah muqayyadah* merupakan suatu bentuk kerjasama antara *saibul maal* dengan *mudharib* yang mempunyai cakupan dibatasi dengan tempat, waktu, daerah, jenis, dan sebagainya⁵².

Sama halnya dalam usaha penggilingan padi keliling ini jangka waktu dalam pengoprasionalan mesin padi tersebut tidak ditentukan berapa lama batas waktunya, pemilik mesin menyerahkan kepada pengelola sesuai dengan kemampuan, dan selain itu juga tidak ada pengawasan dalam pengoprasionalanya oleh pemilik mesin padi tersebut dan menyerahkan mesin padi sepenuhnya dengan pengelola. Dimana pemilik memberi kepercayaan dan kebebasan sepenuhnya kepada pengelola dalam menjalankan usaha penggilingan padi tersebut.

2. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Gilingan Padi Keliling Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah.

Syariah Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah terutama dalam perdagangan atau jual – beli, bebas dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang telah

⁵²Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h.99.

ada aturan hukum dan tidak merugikan salah satunya pihak, karena dasar dari bermuamalah itu atau jual beli harus suka sama suka, tidak dengan cara paksa.

Dalam suatu transaksi atau bermuamalah, hal yang terpenting adalah akad, yaitu pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad⁵³. Dengan adanya akad, akan ada hikmah-hikmah akad seperti adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih didalam bertransaksi atau memiliki sesuatu, tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i, akad merupakan "payung hukum" didalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya⁵⁴. Jadi dengan adanya akad kedua belah pihak telah terikat dengan perjanjian.

Islam sendiri juga mendorong umatnya untuk mencari rezeki yang berkah, mendorong berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi diberbagai bidang. Dengan bekerja, setiap individu baik kaum kerabatnya, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkannya, ikut berpartisipasi bagi kemaslatan umat, dan berinfaq dijalan Allah dalam menegakkan kalimatnya⁵⁵. Oleh karena itu dalam menjalankan suatu usaha yang dibenarkan dalam prinsip syariah adalah kejujuran, transparan atau keterbuka serta menjelaskan apa adanya, tidak boleh ada

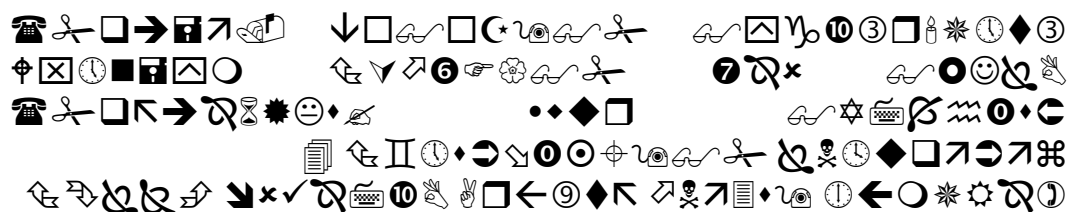
⁵³ Syamsul anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) Ed. 1, h.68.

⁵⁴ Abdul Rahman, *op.cit.*, h.59.

⁵⁵ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet. Ke-2, h. 24

penipuan salah satu pihak. Selain itu juga dalam bermuamalah memiliki asas yaitu asas ibahah. Yang dirumuskan “pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”⁵⁶. Dalam bermuamalah segala sesuatu itu boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangan yang tegas atas tindakan itu.

Islam juga banyak memberikan motivasi bagaimana menjadi orang yang memiliki harta serba cukup, motivasi itu terlihat dengan banyaknya firman Allah SWT dan sabda Rosul agar seorang muslim giat berusaha. Seperti Rosulullah sendiri pernah mengatakan: tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah”⁵⁷. Untuk dapat memberikan terntu terlebih dahulu harus memiliki. Namun demikian, dalam berusaha, Islam memiliki etika tidak menghalalkan segala cara, sebagaimana firman Allah dalam surat al- Baqarah ayat 168:



Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS Al-Baqarah:168).

Ayat diatas memberikan ultimatum bahwa mendapatkan harta harus dengan jalan yang baik serta mengambil yang halal. Karena sekecil

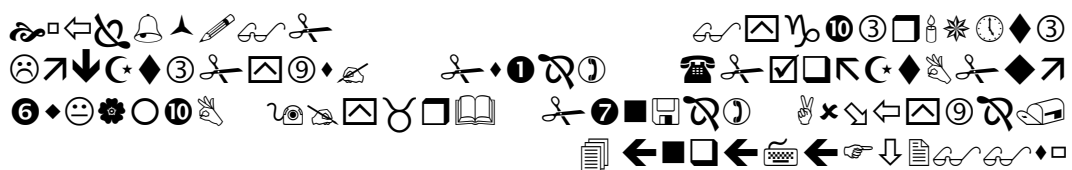
⁵⁶ Syamsul anwar, *op.cit.*, h.83.

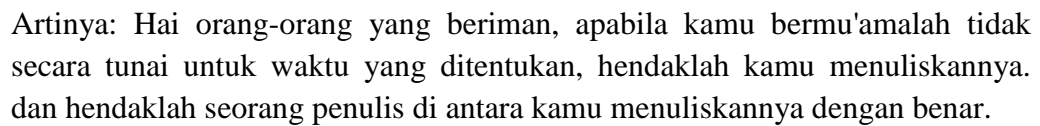
⁵⁷ Ascarya, *Op.cit*, h. 45

apapun nikmat Allah yang dikonsumsi dan dimanfaatkan akan dimintai pertanggung jawabannya dihadapan Allah SWT dikemudian hari.

Pada usaha Penggilingan Padi dengan cara keliling di Desa Laksamana ini juga secara tidak langsung berpartisipasi dalam kemaslatan umat. Dimana usaha penggilingan padi keliling ini memberikan kemudahan kepada yang membutuhkannya, karena usaha penggilingan padi ini mendatangi langsung para petani yang ingin menggiling padinya, dan petani tidak harus bersusah payah untuk menggiling padi-padinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data, baik berupa wawancara maupun observasi, maka penulis mengemukakan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Laksamana dalam menjalankan usaha penggilingan padi keliling ini belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *mudharabah* dan Syariat Islam. Dimana Akad yang terjalin antara *shahibul maal* dengan *mudharib* hanya akad lisan bukan tulisan. Sehingga jika ada komplek pengelola tidak memiliki bukti yang kuat. Padahal Islam setiap bermuamalah atau melakukan transaksi hendaknya ditulis. Hal ini tertuang dalam Qs.Al-Baqarah 282:

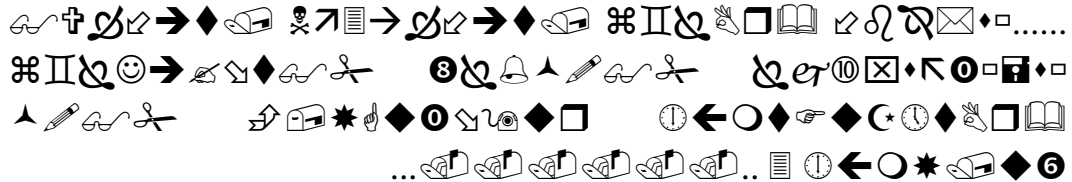




Pada prinsipnya akad *mudharabah* dilaksanakan berdasarkan *amanah, ijarah* dan *wakalah*. Maka si *mudharib* harus menjadi seorang yang amin (terpercaya) bagi *shaibul maal*, sementara itu modal yang ada pada dasarnya adalah merupakan amanat, karena ia menerima dan mengelolanya dengan seizin *shahibul maal*⁵⁸. Dan ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, maka pengelola harta mengambil upah sebagai bayaran dari tenga yang dikeluarkan, maka *mudharabah* dianggap sebagai *ijarah* (upah-mengupah atau sewa-menyewa).

52

Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain yang boleh diwakilkan atau penyerahan seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu⁵⁹. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 283:



Artinya: akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa adanya amanah yang harus dipegang oleh seseorang yang telah diberikan kepercayaan (*mudharib*) untuk menjalankan usaha tersebut.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ada beberapa kategori yang terdapat pada usaha penggilingan padi keliling ini, pertama: memudahkan para pemilik padi dalam menggiling padi-padinya, kedua: mengurangi resiko pengangguran, dan ketiga: sebagai landasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi terutama keluarga. Sehingga didalamnya terdapat aspek kesejahteraan, yang mana semakin banyak orang yang menggiling padi semakin tinggi pula tingkat sosialnya di masyarakat.

Pada umumnya, sistem bagi hasil di Desa Laksamana dilaksanakan dengan tujuan untuk saling tolong menolong untuk berkerjasama berusaha dalam suatu usaha dimana pihak pertama kelebihan dana dan pihak kedua kekurangan modal namun memiliki *skill* sehingga mereka

⁵⁹ Hendi Suhendi, *op.cit.*, h.233.

dapat bekerja sama untuk menjalankan usaha dan keuntungan dibagi bersama, dengan adanya kerjasama dengan sistem bagi hasil ini diharapkan dapat membentuk meningkatkan perekonomian keluarga, setidaknya menambah pendapatan dalam suatu keluarga tersebut. Setelah melihat kenyataan di atas, dan dari hasil wawancara penulis dengan responden, maka dapat penulis simpulkan bahwa akad bagi hasil (*mudharabah*) yang dilakukan oleh usaha penggilingan padi keliling di Desa Laksamana berprinsip saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan, karena hanya bersifat pemindahan hak untuk mengelola usahanya bukan pemindahan hak untuk kepemilikan, usaha ini hanya saja masih ada yang belum sesuai seperti ajaran Islam masih perlu diperhatikan pelaksanaannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penyajian, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan sistem bagi hasil usaha penggilingan padi keliling di Desa Laksamana menggunakan sistem *profit sharing* yaitu sistem pembagian hasilnya dihitung berdasarkan jumlah yang diperoleh oleh pengelola dengan mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam operasional usaha penggilingan padi keliling tersebut. Dengan porsi nisbah dibagi dua atau 50 : 50. Hal ini telah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara *shaibul maal* dengan *mudharib*. Namun sayangnya kesepakatan atau akad yang terjadi antara kedua belah pihak hanya akad lisan, bukan tulisan. Sehingga

jika ada keluhan dari pihak pengelola atas ketidaksesuaian dalam pembagian keuntungan, tidak bisa ditanggapi dengan tegas, karena akad yang dibuat tersebut tidak akad lisan.

2. Menurut konsep *mudharabah* mengenai usaha penggilingan padi di Desa Laksamana masih belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *mudharabah* maupun prinsip Syariah. Dalam menjalankan usaha penggilingan padi keliling tersebut pemilik dan pengelola sama-sama melakukan akad dan disepakati diawal kontrak, pemilik modal menyerahkan mesin padi keliling kepada pengelola untuk mengoperasikan mesin padi tersebut dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi. Hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak meskipun hanya melalui akad lisan. Selain itu juga tidak adanya pengawasa dari pemilik, Pemilik menyerahkan mesin padinya atas dasar kepercayaan. Padahal Islam menganjurkan apabila mengadakan muamalah hendaklah tertulis dan alat bukti lainnya dimana dapat mempermudah jikalau ada persengketaan yang kemungkinan terjadi dikemudian hari.

B. Saran

Setelah penulis berusaha memaparkan pelaksanaan usaha penggilingan padi keliling, penulis ingin memberikan beberapa saran yang harus di perbaiki dalam pelaksanaan usaha penggilingan padi di Desa Laksamana:

1. Hendaknya kegiatan kerjasama usaha penggilingan padi keliling ini dalam mengembangkan usaha harus lebih maksimal, baik itu kontrol dari pemilik serta masukan-masukan tentang usaha tersebut.
2. Hendaknya akad yang terjalin kedua belah pihak di buat secara tertulis. Karena dalam Islam dijelaskan bahwa apabila hendak bermuamalah, melakukan transaksi hendaknya dituliskan, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah 282.
3. Kepada praktisi dan Akademis Konsentrasi Ekonomi Islam dan pemerintah hendaknya juga berperan dalam memberikan penjelasan-penjelasan tentang sistem kerjasama yang sesuai dengan syari'at Islam, dan membantu masyarakat dalam usaha kerjasama yang sesuai dengan undang-undang terutama untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Alma, Buchari, *Dasar-Dasar Etika Islam*, (Bandung : CV . Alvabeta, 2003).
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari teori kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Ed.1
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007).
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2006).
- Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Ibnu Hasan Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah Thahirin Suparta, (Bandung: CV Diponegoro, 1988)
- Ifham, Solihin Ahmad, *Ini Lho, Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2008).
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet. Ke-2
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Ed 3
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002).
- M.rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab ra*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008).
- Muhammad dan Dwi Swiknyo, *Akutansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009).
- Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN,STAIN,PTAIS dan UMUM*, (Bandung : Pustaka Setia,2004).

Said, Muh, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008).

Sirod Hantoro, *Kiat Sukses Berusaha*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2005)

Shomad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008).

Wiyono, Slamet, *Akutansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), cet. Ke 1

<http://imronfauzi.wordpress.com/2008/qiradh-mudharabah-mudharabah/>